

**PEMERIKSAAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAS PAJAK
PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENGUJI
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA CV X)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Jesslyn Grimonia Gunawan

2013130216

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN – PT
No.227/SK/BAN – PT/Ak-XV/S/XI/2013)
BANDUNG
2017

**REVIEW ON FULFILLMENT OF OBLIGATIONS FOR INCOME TAX AND
VALUE ADDED TAX TO VERIFY COMPLIANCE TOWARD TAX
REGULATIONS
(CASE STUDY IN CV X)**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete a part of the requirements
to get a Bachelor Degree in Economics

By:

Jesslyn Grimonia Gunawan

2013130216

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMY
ACCOUNTING STUDY PROGRAM**
(Accredited based on Statement of Decision BAN – PT
No.227/SK/BAN – PT/Ak-XV/S/XI/2013)
BANDUNG
2017



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



**PEMERIKSAAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAS PAJAK
PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENGUJI
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA CV X)**

Oleh:

Jesslyn Grimonia Gunawan

2013130216

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Januari 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.

Pembimbing,

Verawati Suryaputra, S.E., M.M., Ak.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Jesslyn Grimonia Gunawan
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 November 1994
No. Pokok : 2013130216
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

**PEMERIKSAAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAS PAJAK
PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENGUJI
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA CV X)**

Dengan,

Pembimbing : Verawati Suryaputra, S.E., M.M., Ak.

SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademi, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Januari 2017

Pembuat pernyataan : Jesslyn Grimonia



(Jesslyn Grimonia G.)

ABSTRAK

Banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup besar bagi negara. Jika seluruh perusahaan tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka penerimaan pajak dari perusahaan akan sangat membantu penerimaan pajak secara keseluruhan. Di sisi lainnya membayar pajak akan mengurangi penghasilan yang akan diterima oleh perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan selalu berusaha mencari langkah yang strategis untuk membayar pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan. Di sisi lainnya, DJP akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Jika diketahui adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Oleh sebab itu, *tax review* atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan memiliki peran yang penting. *Review* akan membantu perusahaan dalam mengetahui kesalahan dan sanksi-sanksi yang mungkin dikenakan sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh DJP, sehingga perusahaan dapat menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terkait hal tersebut.

Tax review akan menguji kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax review* biasanya dilakukan terhadap pajak yang menganut sistem pemungutan secara *self assessment* dan *withholding* karena risiko akan terjadinya kesalahan penghitungan pajak terutang terdapat pada sistem *self assessment* dan sistem *withholding* (seperti PPh dan PPN). Hal utama yang perlu dilakukan adalah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan itu sendiri, seperti UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), UU PPh, UU PPN, beserta peraturan lain sebagai pelengkap seperti PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan PP (Peraturan Pemerintah). Peraturan perpajakan tersebut kemudian harus diterapkan dalam melakukan *tax review* dalam perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah *descriptive studies*, di mana data dan fakta akan dikumpulkan dari perusahaan yang menjadi objek penelitian, setelah itu data dan fakta akan dianalisis berdasarkan tujuan dari penelitian ini yang didukung juga dengan teori-teori dan Undang-Undang perpajakan. Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *tax review* untuk menilai pemenuhan kewajiban perpajakan PPh dan PPN. Sedangkan unit penelitian yang digunakan adalah CV X yang berlokasi di Bandung. CV X adalah suatu Perusahaan Perseroan Komanditer yang bergerak dalam perdagangan kendaraan bermotor roda empat baik baru maupun bekas terutama kendaraan CBU (*Built Up*).

Berdasarkan hasil *review*, CV X telah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan administratif dengan baik dan melakukan penghitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan atas pajak terutang. Namun, berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, masih ditemui beberapa kekurangan, yaitu terdapat kelebihan pembayaran untuk pemotongan PPh pasal 21 Pegawai Tetap dan kurang bayar atas pemotongan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai, tetapi jumlah lebih bayar masih lebih besar dibandingkan jumlah kurang bayar PPh Pasal 21. Selain itu, terdapat kurang bayar atas PPh Pasal 29 dikarenakan terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dan kurang bayar PPN dikarenakan kesalahan penerapan peraturan terkait penerbitan Faktur Pajak atas cicilan selama tiga bulan pembelian mobil baru yang merupakan program promosi CV X. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman CV X terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, peneliti memberi saran agar CV X dapat lebih memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan selalu mengikuti perkembangannya, meminta kompensasi atau restitusi atas pajak lebih bayar, menjalankan rencana untuk mengikuti *tax amnesty* agar jumlah pokok kekurangan pembayaran dan sanksi administrasi dapat dihapuskan, melengkapi dokumen-dokumen agar biaya yang terjadi dapat dikurangkan dalam koreksi fiskal, dan melakukan *tax review* untuk memastikan kebenaran dari pemenuhan kewajiban perpajakan.

ABSTRACT

Many companies in Indonesia become one of the major sources of tax revenue for the state. If all of these companies meet the tax obligations in accordance with applicable tax laws, the tax revenue from the company will greatly help the overall tax revenue. On the other hand pay the tax will reduce income that will be received by the company. Therefore, companies are always trying to find a strategic move to pay taxes as low as possible by utilizing a grey area of tax regulations. On the other hand, DGT will supervise the implementation of the tax obligations. If it is known there are irregularities in the implementation of tax obligations, it will be subject to tax penalties. Therefore, a tax review on the implementation of the tax obligations in companies have an important role. Review will help the company find out the errors and tax penalties that may be imposed prior to inspection by the DGT, so the company can determine what action will be done about it.

Tax review will examine the compliance of the company in implementing the tax obligations of the existing tax regulations. Tax review is usually carried out against the tax collection system adheres to self-assessment and withholding because of the risk for error calculation of tax payable contained in the self-assessment system and the withholding system (such as income tax and VAT). The main thing to do is to know and understand the tax laws itself, such as KUP (Law on General Provisions and Tax Procedures), Income Tax Law, VAT Law, along with the other regulations as complementary as PMK (Regulation of the Minister of Finance) and PP (Government regulations). The tax laws should then be applied in conducting tax reviews in the company.

Research methods used in this research is descriptive studies, where data and facts will be collected from the company and became the object of research, after it the data and facts will be analyzed based on the purpose of this study and also supported by theories and Law of taxation. The object of research in this paper is a tax review to assess the fulfillment of tax obligations on Income Tax and VAT. While the unit of research in this study is CV X which located in Bandung. CV X is a limited partnership company engaged in the trade of automobiles, both new and second-hand vehicles mainly CBU (Built Up).

Based on a review, CV X has conducted administrative fulfillment of tax obligations properly and perform calculations, collection, remittance and reporting of tax payable. However, based on research results regarding the fulfillment of tax obligations, they found some deficiencies, which are overpaid to withholding income tax Article 21 Permanent Employee and underpayment of Income Tax Article 21 Not Employee, but the amount of the overpayment is still larger than the amount of underpayment of income tax Article 21. In addition, there is an underpayment of Income Tax Article 29, because there are some costs that can not be used as a deduction and underpayment of VAT due to the misapplication of the rules related to the issuance of Tax Invoice on installments for three months of new car purchase that is due to a promotional program at CV X. There are due to the lack of comprehension of CV X to existing tax regulations. Therefore, the researcher suggested that CV X could better address the prevailing tax regulations and always follow its development, asked for compensation or restitution of tax overpayments, working out a plan to follow the tax amnesty so that the principal amount of underpayment and administrative tax penalties could be eliminated, complete set of documents so the costs incurred can be deducted in the fiscal correction, and perform tax reviews to ensure the correctness on fulfillment of tax obligations.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMERIKSAAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENGUJI KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA CV X)”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.

Proses pembuatan skripsi ini bukan hanya merupakan usaha pribadi penulis, namun tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Rudyanto Gunawan dan Stella Perwitasari Tanujaya yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1. Semoga Papa dan Mama selalu diberkati Tuhan Yesus.
2. Ibu Verawati Suryaputra, S.E., M.M.,Ak., selaku pembimbing skripsi penulis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan saran yang telah diberikan selama ini. Semoga dengan segala bimbingan dan saran yang diberikan dapat membuat saya semakin maju untuk ke depannya.
3. Adik penulis, Jevon Antonio Gunawan yang memberi semangat untuk penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Ibu Maria Merry Marianti, Dra., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Parahyangan.
5. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Parahyangan.
6. Segenap dosen Universitas Katholik Parahyangan yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap jajaran pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Parahyangan yang membantu penulis dalam hal administrasi selama perkuliahan.

8. Pemilik dan segenap karyawan CV X yang telah memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian di CV X dan telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman akunpar 2013, Tiffani, Feliciah, Stella, Daia, Sylvi, Vani, Nita, Senia, Liana, Devina, Yessica serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah selalu memberikan semangat dan bantuan, juga telah menjadi teman yang baik selama perkuliahan.
11. Teman-teman SMA, Giam, Lala, Mitha, Nia, Astri yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap pihak lainnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung selama masa-masa perkuliahan juga dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu dan penulis ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka atas kritik dan saran terkait skripsi ini. Selain itu, penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membaca dan mempergunakan skripsi ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang terdapat dalam skripsi ini.

Bandung, Januari 2017

Jesslyn Grimonia Gunawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Manfaat Penelitian.....	2
1.5. Kerangka Pemikiran.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pajak.....	6
2.1.1. Wajib Pajak.....	6
2.1.1.1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	7
2.1.1.2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	7
2.1.1.3. Kewajiban Pembukuan.....	8
2.1.2. Cara Pemungutan Pajak.....	9
2.2. Pajak Penghasilan (PPh).....	10
2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan.....	11
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan.....	12
2.2.3. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	16
2.2.4. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	17
2.2.5. Pajak Penghasilan Pasal 25.....	21
2.2.6. Pajak Penghasilan Pasal 29 atau 28A.....	22
2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
2.3.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	22
2.3.1.1. Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	23
2.3.1.2. Non Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	23
2.3.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	24
2.3.3. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Tarif.....	29
2.3.4. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	30

2.3.5. Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai	31
2.3.6. Faktur Pajak.....	32
2.4. Surat Pemberitahuan (SPT).....	32
2.4.1. Fungsi Surat Pemberitahuan.....	33
2.4.2. Jenis Surat Pemberitahuan.....	34
2.4.3. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan	34
2.5. Surat Setoran Pajak (SSP)	34
2.6. Pembayaran atau Penyetoran Pajak.....	35
2.7. Surat Ketetapan Pajak (SKP)	37
2.7.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	37
2.7.2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	38
2.7.3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)	38
2.7.4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)	39
2.8. Surat Tagihan Pajak (STP).....	39
2.9. Pemeriksaan.....	40
2.10. Sanksi Perpajakan.....	40
2.10.1. Sanksi Administrasi.....	40
2.10.2. Sanksi Pidana	43
2.11. <i>Tax Review</i>	45
2.12. Persekutuan Komanditer (CV).....	47
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	48
3.1. Metode Penelitian.....	48
3.2. Langkah-Langkah Penelitian.....	48
3.3. Objek Penelitian	53
3.3.1. Profil CV X	53
3.3.2. Struktur Organisasi CV X	54
3.3.3. Rincian Pekerjaan CV X	54
BAB 4 PEMBAHASAN	56
4.1. Kewajiban Perpajakan CV X	56
4.1.1. Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2).....	58
4.1.2. Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21	59
4.1.3. Pemenuhan Kewajiban Pasal 25.....	62
4.1.4. Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 29	64
4.1.5. Pemenuhan Kewajiban PPN.....	68
4.2. Pelaksanaan <i>Tax Review</i>	71
4.2.1. <i>Tax Review</i> PPh Pasal 4 Ayat (2)	72

4.2.2. <i>Tax Review</i> PPh Pasal 21.....	72
4.2.3. <i>Tax Review</i> PPh Pasal 25.....	79
4.2.4. <i>Tax Review</i> PPh Pasal 29.....	82
4.2.5. <i>Tax Review</i> PPN	86
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Sanksi Administrasi Berupa Bunga	40
Tabel 2.2. Tabel Sanksi Administrasi Berupa Denda	41
Tabel 2.3. Tabel Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan.....	42
Tabel 4.1. Tabel Daftar Dokumen Perusahaan.....	57
Tabel 4.2. Tabel Penghitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan CV X Tahun 2015	60
Tabel 4.3. Tabel Penghitungan PPh Pasal 21 Dengan THR (Tunjangan Hari Raya Berdasarkan CV X Tahun 2015	61
Tabel 4.4. Tabel Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21 CV X Tahun 2015	62
Tabel 4.5. Tabel Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun 2014.....	63
Tabel 4.6. Tabel Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun 2015.....	63
Tabel 4.7. Tabel Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2015.....	63
Tabel 4.8. Tabel Penyesuaian (Rekonsiliasi) Fiskal Berdasarkan CV X Tahun 2015	65
Tabel 4.9. Tabel Penghitungan PPh Pasal 29 berdasarkan CV X Tahun 2015.....	67
Tabel 4.10. Tabel Rekapitulasi PPN Mobil Baru Tahun 2015.....	68
Tabel 4.11. Tabel Rekapitulasi PPN Mobil Bekas 2015	69
Tabel 4.12. Pembayaran PPN Berdasarkan SPT Masa PPN CV X Tahun 2015	70
Tabel 4.13. Tabel Rincian Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN CV X Tahun 2015	71
Tabel 4.14. Tabel Hasil Review Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2015.....	72
Tabel 4.15. Tabel Review Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2015	72
Tabel 4.16. Tabel Penghitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peneliti Tahun 2015	73
Tabel 4.17. Tabel Penghitungan Pasal 21 Dengan THR (Tunjangan Hari Raya) Berdasarkan Peneliti Tahun 2015	74
Tabel 4.18. Tabel Review Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2015.....	76
Tabel 4.19. Tabel Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Tahun 2015.....	78
Tabel 4.20. Tabel Review Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun 2014	80
Tabel 4.21. Tabel Review Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun 2015	80
Tabel 4.22. Tabel Review PPh Pasal 25 Tahun 2015	81
Tabel 4.23. Tabel Review Rekonsiliasi (Penyesuaian) Fiskal Tahun 2015	83

Tabel 4.24. PPh Pasal 29 Berdasarkan Tax Review Tahun 2015	85
Tabel 4.25. Tabel Review Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 29 Tahun 2015.....	86
Tabel 4.26. Tabel Review Rekapitulasi PPN Mobil Baru Tahun 2015	87
Tabel 4.27. Tabel Perbandingan Hasil Review dengan Data CV X PPN Mobil Baru Tahun 2015	88
Tabel 4.28. Tabel Review Rekapitulasi PPN Mobil Bekas Tahun 2015	89
Tabel 4.29. Tabel Perbandingan Hasil Review dengan Data CV X PPN Mobil Bekas Tahun 2015	90
Tabel 4.30. Tabel Review Pembayaran PPN Tahun 2015	91
Tabel 4.31. Tabel Review Penyetoran dan Pelaporan PPN Tahun 2015	92
Tabel 4.32. Tabel Review Pembayaran PPN Tahun 2015	93
Tabel 4.33. Tabel Rekapitulasi Sanksi Kurang Bayar PPN Tahun 2015	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Langkah-Langkah Penelitian.....	52
Gambar 3.2. Struktur Organisasi CV X	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak. Dalam hal pembayaran pajak diperlukan peran serta dari seluruh masyarakat untuk memahami betul mengenai kewajiban dan pentingnya membayar pajak. Banyak manfaat yang akan diterima oleh seluruh masyarakat jika kita rakyat Indonesia mau membayar pajak. Hasil penerimaan pajak akan disetorkan ke kas negara, dana yang tersedia dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan fasilitas umum secara berkelanjutan, subsidi, dan pengembangan yang dapat dilaksanakan di berbagai bidang. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk kepuasan seluruh masyarakat, sehingga pajak yang diperoleh dari masyarakat akhirnya akan kembali lagi ke masyarakat.

Banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia juga menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup besar bagi negara. Segala macam perusahaan, baik perseorangan maupun badan semakin banyak bermunculan karena pesatnya perkembangan ekonomi. Jika seluruh perusahaan tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka penerimaan pajak dari perusahaan akan sangat membantu penerimaan pajak secara keseluruhan.

Di sisi lainnya membayar pajak akan mengurangi penghasilan yang akan diterima oleh perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan selalu berusaha mencari langkah yang strategis untuk membayar pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan. Hanya pajak dengan sistem pemungutan *self assessment* dan *withholding* (seperti PPh dan PPN) yang dapat dimanfaatkan karena penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan akan pajak terutang dilakukan oleh perusahaan. Sementara itu, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Jika diketahui adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi perpajakan.

Dalam hal ini *tax review* memiliki peran yang cukup penting. *Review* akan membantu perusahaan untuk mengetahui kesalahan dan sanksi-sanksi yang mungkin dikenakan sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh DJP. Perusahaan dapat menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terkait kesalahan tersebut, baik dilakukan pembetulan atau mempersiapkan diri bila dilakukan pemeriksaan. Diharapkan setelah mengetahui hal tersebut perusahaan dapat mengalokasikan sejumlah dana terlebih dahulu yang diperlukan untuk membayar sanksi perpajakan yang mungkin akan dikenakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan *review* terhadap CV X dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan di CV X?
2. Bagaimana hasil *review* terhadap pemenuhan kewajiban atas PPh dan PPN untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan perpajakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti:

1. Mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh CV X.
2. Mengetahui hasil *review* dan kemungkinan adanya risiko dikenakannya sanksi perpajakan pada CV X atas kesalahan dalam pemenuhan kewajiban atas PPh dan PPN, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan atas kesalahan tersebut untuk masa pajak selanjutnya agar tidak terulang kembali.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti terutama dalam hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Peneliti juga diharapkan dapat mempraktikkan ilmu dan teori yang telah dipelajari khususnya selama di perkuliahan.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif pada perusahaan. *Tax review* yang dilakukan pada perusahaan diharapkan dapat membantu menguji apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan peraturannya. Perusahaan diharapkan dapat mengetahui dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat menghindari sanksi pajak yang mungkin dikenakan. Atas hasil dari *tax review* ini diharapkan perusahaan akan melaksanakan saran dan rekomendasi agar dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

3. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi para pembaca. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi para peneliti lain yang sedang atau akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

1.5. Kerangka Pemikiran

Terdapat tiga cara yang digunakan di Indonesia dalam menentukan pajak terutang yaitu sistem *official assessment*, sistem *self assessment*, dan sistem *withholding*. Pada sistem *official assessment* risiko kesalahan sangat kecil karena penghitungan telah dilakukan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Risiko akan terjadinya kesalahan penghitungan pajak terutang terdapat pada sistem *self assessment* dan sistem *withholding*, oleh sebab itu *tax review* biasanya dilakukan terhadap pajak yang menganut sistem pemungutan secara *self assessment* dan *withholding*. Dalam kasus penelitian ini, peneliti menggunakan CV X yang bergerak di bidang jual beli mobil. CV X memiliki kewajiban terhadap PPh dan PPN, yang keduanya menganut sistem pemungutan secara *self assessment* dan *withholding*. Peneliti memutuskan untuk melakukan review terhadap PPh dan PPN perusahaan.

Tax review akan menguji kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, oleh sebab itu hal utama yang perlu dilakukan adalah mengetahui dan memahami peraturan

perpajakan itu sendiri, seperti UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), UU PPh, UU PPN, beserta peraturan lain sebagai pelengkap seperti PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan PP (Peraturan Pemerintah). Peraturan perpajakan tersebut kemudian harus diterapkan dalam melakukan *tax review* dalam perusahaan. Untuk CV X, maka perlu diperhatikan peraturan perpajakan khusus untuk bentuk usaha CV dan kegiatan jual beli mobil yang dilakukan perusahaan. Contohnya, terdapat ketentuan pada UU PPh terkait bentuk usaha CV bahwa bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif bukan merupakan objek pajak.

Untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan terkait penentuan pajak terutang yang harus dibayar atau dipungut, terdapat banyak peraturan yang harus diikuti dalam penentuannya, oleh sebab itu *review* sebaiknya dilakukan untuk memastikan kebenaran penghitungannya. Contohnya, dalam penentuan PPh terutang perusahaan perlu di-*review* kembali biaya-biaya mana yang dapat menjadi pengurang atau tidak sesuai dengan UU PPh. Contoh lainnya, dalam penghitungan PPN terutang kita harus memeriksa kebenaran dan kelengkapan faktur pajak untuk menentukan PPN terutangnya dan menentukan apakah PPN masukan dapat dikreditkan atau tidak.

Menurut Baraka Namla (Baraka Namla. “Bagaimana Melakukan Internal Tax Review?”, <http://www.barakanamla.com/pph-badan/157-bagaimana-melakukan-internal-tax-review>, diakses pada 28 September 2016), berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan *tax review* terhadap PPh badan. Pertama, telaah setiap transaksi dari pembukuan (neraca dan laba-rugi), bila perlu menelaah kontrak serta dokumen bukti terkait, dan mengidentifikasi transaksi apa saja yang perlu dilakukan koreksi fiskal di PPh Badan. Kedua, telaah setiap transaksi dari pembukuan (neraca dan laporan laba rugi) dan mengidentifikasi transaksi apa saja yang terutang pajak. Apabila terdapat transaksi yang tidak jelas aturan pajaknya, tetapi ada potensi dikenakan pajak, maka identifikasi transaksi itu secara terpisah. Hitung jumlah objek pajak maupun potensi objek pajak yang mungkin timbul dari masing-masing transaksi di atas. Kemudian, hitung perkiraan jumlah pajak yang terutang, baik yang jelas terutang maupun yang potensi terutang karena *grey area*.

Berikutnya, rekap pajak yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan melalui SPT, akan lebih baik jika setoran pajak bisa ditelusuri ke setiap transaksi terkait. Terakhir, Hitung perkiraan jumlah pajak terutang yang harus dibayar dan berapa jumlah pajak yang kurang bayar, serta berapa potensi pajak yang mungkin timbul di kemudian hari. Secara umum langkah-langkah tersebut juga dapat dilakukan untuk *review* PPN.

Terdapat beberapa hal lainnya yang harus diperhatikan terkait dengan pelaksanaan *tax review*. Pertama adalah pentingnya kelengkapan dokumen-dokumen yang harus di-*review*, seperti laporan keuangan dan dokumen lain terkait pemenuhan kewajiban perpajakan (SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), SSP (Surat Setoran Pajak), dll.). Jika dokumen yang akan di-*review* sudah lengkap, maka segala hal terkait dengan proses *review* akan berjalan dengan lancar dan hasil *review* pun dapat semakin optimal. *Tax review* juga diharapkan dapat mengurangi kewajiban kontinjen perusahaan yaitu kewajiban yang akan timbul di masa yang akan datang terkait pemenuhan kewajiban perpajakan.